

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Minyak kelapa sawit merupakan komoditi unggulan Indonesia sebagai penghasil devisa negara. Pada tahun 2018, ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya mencapai USD 18,3 milyar, menjadikan komoditi ini sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Industri minyak kelapa sawit berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mampu menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja. Mengingat besarnya kontribusi industri minyak kelapa sawit bagi perekonomian nasional dan menjadi industri tumpuan bagi banyak rakyat Indonesia, maka pemerintah harus memberikan dukungan terhadap pengembangan industri kelapa sawit nasional (Purwanto, 2020).

Dukungan pemerintah Indonesia kepada industri minyak kelapa sawit nasional telah mendorong peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit secara pesat (Purwanto, 2020). Selama lima tahun terakhir (2014-2018), total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia bertambah 3,57 juta ha atau meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,89%. Pada tahun 2018, luas areal perkebunan kelapa sawit tercatat mencapai 14,32 juta ha. Bahkan bila mengacu pada data hasil rekonsiliasi perhitungan luas tutupan kelapa sawit nasional pada tahun 2019, angkanya lebih besar yakni 16,38 juta ha. Luas areal perkebunan kelapa sawit ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya permintaan minyak sawit dunia.

Kalimantan Barat menempati posisi ke-3 yang memiliki luas lahan terbesar dalam pengusahaan perkebunan kelapa sawit setelah Provinsi Riau dan Sumatera Utara (BPS, 2020). Kabupaten Sambas merupakan Kabupaten yang menempati posisi ke-4 terbesar yang memiliki populasi petani swadaya di Provinsi Kalimantan Barat. Total luas lahan dan produksi pada tahun 2016 luas tanaman mencapai 26.624 Ha, dengan produksi sebesar 33.806 Ton dan tahun 2020 luas tanaman meningkat menjadi 96.278 Ha, dengan produksi sebesar 207.267 ton. (BPS Kalbar, 2021). Adanya peningkatan luas lahan perkebunan menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit dapat memberikan peluang yang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pertambahan luas perkebunan kelapa sawit swadaya meski memberikan manfaat bagi perekonomian nasional tetapi disisi lain masih menghadapi berbagai masalah diantaranya rendahnya produktivitas, masalah sosial dan pengelolaan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan (GAPKI, 2019). Produktivitas pola swadaya lebih rendah dari perusahaan besar, produktivitas pola swadaya sekitar 2,5 sampai 3 ton per hektar, sedangkan untuk perkebunan besar swasta sekitar 3,5 sampai 4 ton per hektar (Risa, 2018). Masalah sosial seperti timbulnya konflik lahan (Aprilia, 2020). Perluasan lahan dengan cara yang tidak berkelanjutan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan serta bagi perdagangan kelapa sawit di pasar internasional (SPKS, 2017).

Pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan penting dilakukan karena dapat mengurangi ancaman terhadap sumber daya, deforestasi (Purba dan Sipayung, 2017), perluasan lahan yang tidak ramah lingkungan (Aprilia, 2020), serta kerusakan terhadap ekosistem gambut (Sabiham, 2013). Salah satu penyebab rendahnya produktivitas dikarenakan banyak tanaman yang sudah tua dan masih banyak petani yang belum menerapkan budidaya dengan cara yang benar sehingga perlu dilakukan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

petani swadaya memiliki keterbatasan dari segi pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola usahataniya sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas kelapa sawit yang dihasilkan (Valentina, 2019). Keberadaan bantuan dari luar sangat diperlukan, berupa bimbingan dan pembinaan usaha yang dapat mendorong petani menerima hal-hal baru dalam mengandalkan tindakan perubahan atau yang disebut sebagai adopsi inovasi. Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat penerimaan inovasi, diantaranya adalah dimensi budaya. Budaya menjadi salah satu aspek penting karena budaya setiap individu berbeda dari yang satu dengan individu yang lain, kumpulan individu yang memiliki dimensi budaya akan menghasilkan karakteristik pada setiap kelompok atau lingkungan (Sari, 2020).

Upaya memperbaiki tata kelola perkebunan sawit dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO*) (Permentan, 2020), sehingga tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh kultur, pengetahuan dan kemampuan belajar petani swadaya untuk mengadopsi ISPO

menggunakan pendekatan teori adopsi inovasi (Rogert, 1983), kultur (Hofstede, 1983), pengetahuan (Mardikanto, 1992), kemampuan belajar (Malta, 2008), mengacu pada Permentan No. 38/2020 tentang Pengelolaan Sawit Berkelanjutan untuk menjadi pedoman umum dalam melaksanakan pengelolaan sawit secara benar dan tepat, sehingga penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kultur, pengetahuan dan kemampuan belajar petani swadaya dalam melakukan pengelolaan usahatani.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kultur, pengetahuan dan kemampuan belajar petani swadaya terhadap adopsi ISPO di Kabupaten Sambas?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kultur, pengetahuan dan kemampuan belajar petani swadaya terhadap adopsi ISPO di Kabupaten Sambas.